

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (*Legisprudence*) Volume I Pemahaman Awal. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Amir Ilyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Rangka Education.
- Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, 2004, raja grafindo persada
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1991.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. 7. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia, Edisi IV , (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000)
- Azmi Fendri, Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara, PT. Raja grafindo, Jakarta, 2016
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006,
- Busyra Azheri, Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Jakarta, Raja Grafindo Press, 2011
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Effendy Rusli, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang, LEPPEN-UMI
- E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992
- Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

- Hans Kelsen(b), sebagai mana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006
- HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006,
- Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2020
- K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Kanter dan Sianturi. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Stora Grafika. Jakarta. 2002
- Mahrus Ali. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika
- Moeljatno. (2007). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- P.A.F. Lamintang. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Roeslan Saleh. "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana". Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002
- S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya. Alumni : Jakarta. 1982
- Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cetakan Ke 9, Politea, Bogor, 1986
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996

Sutan Remy Sjahdeini. (2017). *Ajaran Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya* (edisi kedua), Depok: Kencana

Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang. 2003

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014

Aturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah